

## **Peran SPI sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Teknologi Informasi dan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKAD Kota Semarang)**

**Septiana Rahma Asri, Jaeni**

Universitas Stikubank Semarang

\*Correspondence: [septianarahmaasri@mhs.unisbank.ac.id](mailto:septianarahmaasri@mhs.unisbank.ac.id), [jaeni@edu.unisbank.ac.id](mailto:jaeni@edu.unisbank.ac.id)

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk menguji peran spi sebagai pemoderasi pada pengaruh teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 112 pegawai BPKAD Kota Semarang. Variabel yang digunakan yakni teknologi informasi dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel independen, sedangkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah SPSS (*Statistical Package For Science*) versi 24. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut: Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern tidak memperkuat teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern memperkuat standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata kunci :** Kualitas Laporan Keuangan, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah.

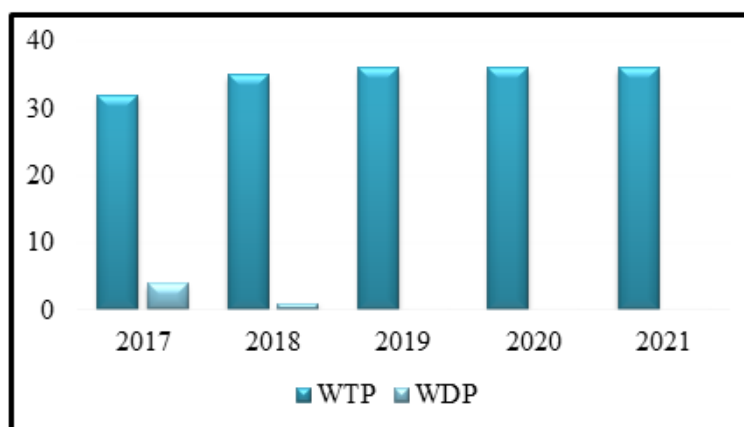
**Abstract.** *The purpose of this study was to examine the role of spi as a moderator on the effect of information technology, government accounting standards on the quality of financial reports. This research was conducted quantitatively. This research involved 112 BPKAD employees in Semarang City. The variables used are information technology and government accounting standards as independent variables, while the quality of financial reports is the dependent variable and the internal control system is the moderating variable. The analysis technique used is multiple linear regression with classical assumptions. The data analysis technique used is SPSS (Statistical Package For Science) version 24. Based on the results of the analysis and discussion, the following conclusions are drawn: Information technology has a positive and significant effect on the quality of financial reports. Government accounting standards have a positive and significant effect on the quality of financial reports. The internal control system has a positive and significant effect on the quality of financial reports. The internal control system cannot strengthen information technology on the quality of government reports. The internal control system reinforces government accounting standards for the quality of financial reports.*

**Keywords :** *Quality of Financial Reports, Information Technology, Internal Control System, Government Accounting Standards.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam pemerintah, pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan dukungan dari akuntan yang andal. Hal ini diperlukan akuntansi sektor publik agar semakin berkembang dan meningkat guna mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang memiliki kualitas dan keakuratan dalam penyampaian informasi, akan menciptakan kepercayaan pembaca terhadap informasi tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas transaksi dan peristiwa keuangan, menyajikan laporan keuangan interpretasi hasil. SAP yang merupakan akuntansi perinsip dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintah dan peramalan perekonomian setelah kegiatan dilaksanakan (PSAP, 2010). Pengaruh dari adanya otonomi daerah yaitu adanya tuntutan akuntabilitas baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah dari pra-reformasi menuju reformasi menyebabkan adanya pergeseran dari pemerintah sentralisasi menuju

pemerintahan yang menerapkan asas desentralisasi sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan otonomi daerah. Bentuk tugas untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2004).



Sumber : [jateng.bpk.go.id](http://jateng.bpk.go.id)

**Gambar 1**  
**Opini LKPD Kota Semarang**

Gambar 1 terlihat perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat Kota Semarang dari tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017 dan 2018 masih terdapat pemerintah daerah dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menandakan bahwa laporan keuangan belum berkualitas atau belum diakui WTPnya oleh BPK. Adanya WDP karena pelaporan keuangan pemerintah tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK. Dalam pemeriksaan BPK tahun 2018 atas laporan keuangan Kota Semarang, BPK menemukan catatan yang baik terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI menemukan beberapa masalah, yaitu: ([jateng.bpk.go.id](http://jateng.bpk.go.id)) 1) Pengelolaan dan pengendalian aktiva tetap tidak dilakukan dengan baik; 2) Belum tertibnya pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bos; 3) Pengelolaan pajak daerah; dan 4) Pengelolaan hibah

Fenomena selanjutnya yang ditemukan BPK dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dilakukan oleh ASN dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, yakni: 1) Pengelolaan kas, pengelolaan dana, pengeluaran yang dikelola bendahara tidak sesuai aturan, pajak belum disetor ke mesin kas, rekening dana induk menunjukkan pajak dan biaya administrasi; 2) Kekurangan volume pekerjaan fisik yang mengakibatkan kelebihan pembayaran; 3) Proses pembelian sewa yang belum selesai

Berdasarkan fenomena tersebut dikatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang dipersyaratkan. Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menghasilkan hasil yang berbeda-beda, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Angelita Serlina Langwo & Saifhul Anuar Syahdan (2022), namun penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada tujuannya yaitu dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sistem pengendalian intern dalam memoderasi teknologi informasi, standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

#### *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Teori keagenan membahas tentang hubungan kerja sama antara penerima manfaat (principal) dan penerima manfaat (agen) dalam suatu kontrak kerja sama, yaitu “nexus of contract”. Dalam hal ini, pemerintah merupakan agen yang wajib menyediakan laporan keuangan agar berkualitas kepada masyarakat luas. Kualitas pelaporan keuangan yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab direksi kepada masyarakat (Rahmawati & Trisnawati, 2021). Menurut Putro (2013) dalam Langwo & Syahdan (2022) teori stewardship merupakan teori yang mengendalikan bahwa ada hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Teori hubungan stewardship berusaha

menjelaskan bagaimana keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga atau instrumen yang dapat diandalkan untuk menangani pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mampu mendukung masing-masing instansi yang menjalankan bisnis, kemudian para manajer (manajer dan auditor internal) benar-benar mengelola semua keterampilan mereka untuk meningkatkan pengendalian internal dan menghasilkan laporan data keuangan yang berkualitas tinggi (Wahida, 2015). Berdasarkan teori tersebut, ada hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan teori *stewardship*.

Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, yang mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom (Aziz, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah yang baik harus memiliki empat karakteristik yaitu, relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan adalah pernyataan manajemen yang memberikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan tanggung jawab entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan pendapatan aktual, pengeluaran, transfer, dan pendanaan dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai Kesehatan keuangan dan menentukan kepatuhan terhadap undang-undang serta peraturan (Adhi & Suhardjo, 2013). Kualitas laporan keuangan Pemda (pemerintah daerah) dapat dilacak dan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna (Defitri, 2016). Pengelolaan kualitas pelaporan keuangan yang tepat dan terarah mengarah pada anggaran yang terarah.

#### *Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Pemanfaatan teknologi menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, yaitu implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi sudah umum di semua bidang akuntansi, perkembangan penggunaan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akuntansi perusahaan, dengan maraknya teknologi informasi, fungsi pengolahan data akuntansi yang semula dilakukan secara manual kini menjadi otomatis, penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempercepat pengiriman laporan keuangan tepat waktu. Karyawan yang berkomitmen terhadap organisasinya memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi (Fathia, dk, 2020).

#### *Pengaruh SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Hasil pelaporan keuangan yang berkualitas. Penyelesaian tugas dan penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan. Yang utama adalah keterlibatan pegawai dalam mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi pemerintah dilakukan berpedoman pada prinsip dan standar akuntansi pemerintah peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntan publik dan meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD (Rahmawati & Trisnawati, 2021). Nordiawan (2006) menyatakan bahwa karena dampak standar akuntansi administrasi publik baik di administrasi publik di kementerian, disimpulkan bahawa pengenalan SAP kemungkinan akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Pengaruh SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan* Menurut Rahmawati & Trisnawati (2021), pengendalian internal dapat berarti mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya organisasi. Pengendalian internal memainkan peran yang sangat penting dalam mendeteksi penipuan dan mengelola keberadaan aset berwujud (seperti mesin dan tanah) dan aset tidak berwujud (seperti reputasi dan merek). Fathia, dkk (2020) mencatat bahwa pengendalian internal merupakan ukuran pertama ketika menemukan temuan dalam laporan keuangan, sehingga peran pengendalian internal adalah bertindak secara objektif dan independen untuk menghindari isu-isu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

*Peran SPI sebagai variabel moderasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pusat dan pemerintah daerah, karena dalam sistem pengendalian intern merupakan alat untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai guna tercapainya suatu pengendalian manajemen. Merujuk pada penelitian Hardyansyah & Khalid (2016) menunjukkan bahwa teknologi informasi dimoderasi pada sistem pengendalian intern berpengaruh positif. Sistem internal yang tepat dapat memaksimalkan penggunaan teknologi.

*Peran SPI sebagai variabel moderasi SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Penerapan sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diharapkan mendukung efisiensi dan efektivitas implementasi standar akuntansi untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Mengutip penelitian Angelita Serlina Langwo & Saiful Anuar Syahdan (2022) menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah yang berpedoman pada sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan hasil yang berkualitas.

**METODE**

Sujarweni (2015) populasi mengacu pada agregat yang terdiri dari objek atau item yang memiliki ciri dan ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan disimpulkan darinya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor BPKAD Kota Semarang yang berjumlah 112 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling dalam metode pengambilan sampel. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan digali berasal dari sumber yang sengaja dipilih menurut kriteria tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai yang melaksanakan tugas akuntansi dan pengelolaan keuangan di BPKAD Kota Semarang (minimal 1 tahun selama penyusunan laporan akhir).

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara. Sumber data penelitian ini adalah data dasar yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kuesioner dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Pengukuran data pada skala likert digunakan dalam pernyataan kuesioner peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan program *Windows Release Version 24 SPSS (Statistical Package For Science)*.

**HASIL**

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Teknologi Informasi (X1)</b>	<b>Nilai R Hitung</b>	<b>Nilai R Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,463	0,185	Valid
2	0,465	0,185	Valid
3	0,286	0,185	Valid
4	0,511	0,185	Valid
5	0,399	0,185	Valid
6	0,492	0,185	Valid
7	0,475	0,185	Valid
8	0,389	0,185	Valid
<b>Standar Akuntansi Pemerintah (X2)</b>	<b>Nilai R Hitung</b>	<b>Nilai R Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	0,640	0,185	Valid
2	0,660	0,185	Valid
3	0,706	0,185	Valid
4	0,724	0,185	Valid
5	0,609	0,185	Valid
6	0,624	0,185	Valid

7	0,596	0,185	Valid
8	0,535	0,185	Valid
9	0,588	0,185	Valid
10	0,683	0,185	Valid
11	0,670	0,185	Valid
<b>Sistem Pengendalian Intern (Z)</b>			
1	0,593	0,185	Valid
2	0,567	0,185	Valid
3	0,582	0,185	Valid
4	0,665	0,185	Valid
5	0,554	0,185	Valid
<b>Kualitas Laporan Keuangan (Y)</b>			
1	0,760	0,185	Valid
2	0,645	0,185	Valid
3	0,601	0,185	Valid
4	0,600	0,185	Valid
5	0,663	0,185	Valid
6	0,581	0,185	Valid
7	0,615	0,185	Valid
8	0,675	0,185	Valid

Sumber: data olahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar daripada  $r_{tabel}$ . Tabel 2 menyatakan bahwa setiap variable reliabel karena nilai *Chronbch's alpha* lebih dari 0,6, rincian teknologi informasi 0,740, standar akuntansi pemerintah 0,902, sistem pengendalian intern 0,805, dan kualitas laporan keuangan 0,878, sehingga variabel yang digunakan konsisten dan dapat digunakan untuk menjadi terpercaya.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Teknologi Informasi	0,740	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,902	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,805	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,878	Reliabel

Sumber: data olahan

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96532084
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.059
	Negatif	-.067
Test Statistic		.067
Asymp.Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data olahan

Tabel 2 Uji normalitas menunjukkan grafik distribusi normal dan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya adalah: jika signifikan  $> 0,05$ , maka data distribusi normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pada tabel 2, data dinyatakan normal karena nilai Asymp. Sig. (dua arah)  $0,200 > 0,05$ . Tabel 3, diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari nilai 0,1 dan nilai VIF lebih

kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen yang diteliti.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	.937		
Teknologi Informasi	.005	.557	1.794
Standar Akuntansi Pemerintah	.000	.387	2.587
Sistem Pengendalian Intern	.002	.487	2.054

Sumber: data olahan

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	6.699	1.409		
Teknologi Informasi	-.025	.052	-.057	-.477	.634
Standar Akuntansi Keuangan	-.039	.036	-.154	-1.075	.285
Sistem Pengendalian Intern	-.114	.069	-.210	-1.646	.103

Sumber: data olahan

Hasil Tabel 4, menghasilkan nilai signifikan semua model variabel diatas nilai kritisnya sebesar 0.05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Tabel 4 hasil uji koefisien korelasi regresi, menunjukkan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,444 menunjukkan bahwa hanya 44,4% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X, sisanya 55,6% (100% - 44,4%) dijelaskan oleh faktor lain.
2. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,689 menunjukkan bahwa hanya 68,9% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X, sisanya 31% (100% - 68,9%) dijelaskan oleh faktor lain.
3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,508 menunjukkan bahwa hanya 50,8% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel X, sisanya 49,2% (100% - 50,8%) dijelaskan faktor lain.
4. Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,619 (61,9%) menunjukkan bahwa 61,9% variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) bisa dijelaskan oleh variabel Teknologi Informasi (X) yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Intern (Z), sisanya 38,1% (100% - 61,9%) dijelaskan oleh faktor lain.
5. Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai adjusted R square sebesar 0,716 (71,6%) menunjukkan bahwa 71,6% variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) bisa dijelaskan oleh variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X) yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Intern (Z) sisanya 28,4% dijelaskan oleh faktor lain.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi Regresi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.670 <sup>a</sup>	.449	.444	2.891
2	.832 <sup>a</sup>	.691	.689	2.163
3	.716 <sup>a</sup>	.513	.508	2.718

4	.791 <sup>a</sup>	.626	.619	2.393
5	.849 <sup>a</sup>	.721	.716	2.067

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil Tabel 5:

1. Model Summary Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada tabel diatas diperoleh nilai kekuatan hubungan (R) antara Teknologi Informasi (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,670 (67%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang kuat.
2. Model Summary Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada tabel diatas diperoleh nilai kekuatan hubungan (R) antara Standar Akuntansi Keuangan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,832 (83,2%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang kuat.
3. Model Summary Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada tabel diatas diperoleh nilai kekuatan hubungan (R) antara Sistem Pengendalian Intern (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,716 (71,6%). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang kuat
4. Model Summary Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada tabel diatas diperoleh nilai kekuatan hubungan (R) antara Teknologi Informasi yang dimoderasi Sistem Pengendalian Intern (Z) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,791 (79,1%). Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan yang kuat.
5. Model Summary Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi pada tabel diatas diperoleh nilai kekuatan 0,849 (84,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan yang kuat.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	748.501	1	748.501	89.544	.000 <sup>b</sup>
	Residual	919.499	110	8.359		
	Total	1668.000	111			
2	Regression	1153.359	1	1153.359	264.521	.000 <sup>b</sup>
	Residual	514.641	110	4.679		
	Total	1668.000	111			
3	Regression	855.200	1	855.200	115.738	.000 <sup>b</sup>
	Residual	812.800	110	4.679		
	Total	1668.000	111			
4	Regression	1043.959	2	521.979	91.173	.000 <sup>b</sup>
	Residual	624.041	109	5.725		
	Total	16668.000	111			
5	Regression	1202.387	2	601.194	104.740	.000 <sup>b</sup>
	Residual	465.613	109	4.272		
	Total	16668.000	111			

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 6 menjelaskan bahwa:

1. Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa nilai F-hitung 89,544 > F-tabel 2,69 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa nilai F-hitung 264.521 > F-tabel 2,69 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka

hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa nilai F-hitung  $115,738 > F\text{-tabel } 2,69$  dengan tingkat signifikansi  $0,000$  lebih kecil daripada  $0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4. Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa F-hitung  $91,173 > F\text{-tabel } 2,69$  dengan signifikansi  $0,000$  maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi menunjukkan F-hitung  $104,740 > F\text{-tabel } 2,69$  dengan signifikansi  $0,000$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 Teknologi Informasi	.240	.083	.189		1.893	.005
2 Standar Akuntansi Pemerintah	.396	.057	.546		6.955	.000
3 Sistem Pengendalian Intern	.354	.019	.227		3.245	.002
4 TI*SPI	.005	.004	.175		1.371	.173
5 SAP*SPI	.012	.002	.675		5.291	.000

Sumber: data olahan

Tabel 8 menjelaskan bahwa (1) angka t untuk kualitas nilai TI adalah 1,893, yang lebih besar dari t tabel =  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 110) = 1,981$  adalah signifikansi  $0,005$  dan koefisien regresi  $0,240$ . Hal ini membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.; (2) Standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, diperoleh hasil t sebesar  $6,955$  lebih besar dari t tabel =  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 110) = 1,981$  yang memiliki nilai signifikansi  $0,000$  dan koefisien regresi sebesar  $0,369$ . Hal ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Pengujian sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, hasil nilai t menunjukkan  $3,245$  lebih besar dari t tabel =  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 110) = 1,981$ , dengan nilai signifikansi  $0,002$  dan koefisien regresi sebesar  $0,354$ . Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) hasil uji-t menunjukkan bahwa interaksi antara variabel teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebesar  $1,371$ , yaitu kurang dari t tabel =  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 110) = 1,981$ , yang memiliki signifikansi  $0,173$  (tidak ada moderasi). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan; dan (5) uji-t interaksi antara variabel standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern memiliki nilai t sebesar  $5,291$  yang lebih besar dari t tabel =  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 110) = 1,981$ , yang memiliki signifikansi  $0,000$  (moderat). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mampu memoderasi hubungan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) Teknologi Informasi memiliki SAP dan SPI memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan; (2) Sistem Pengendalian Intern tidak mampu memperkuat Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan; dan (3) Sistem Pengendalian Intern mampu memperkuat Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 5(3),93-111.
- Aziz, A 2016. Pemerintah karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Eksis Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- Defitri, Siska Yulia 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam Jurnal. ISSN: 2451 111x.
- Desi Lestari, N. K., Kusumawati, N. P.A., & Nuratama, I. P. 2022. Peran kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan lpd se-kecamatan penebel. *Hita Akuntansi Dan Laporan Keuangan*, 3(1), 268-284. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2306>.
- Fathia, Nurul., Amries Rusli Tanjung., & Novita Indrawati 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal PEKBIS*, 12 (1),39-54.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hardyansyah., & Ansyarif Khalid 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*,2(1).
- Ihyani,L., Hansajani,L., & Piturningsiih, E. 2021. Pengaruh sap dan spi terhadap kualitas laporan keuangan dengan refocusing dan realokasi anggaran sebagai pemoderasi. *Jmbi unrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.36653>.
- Ismail, Nuraini., Apriana Marselina., & Elsensiana Bupu Loda 2021. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Journal Systems*. 15(12).
- Kuntadi, C., Juniarty Erika Magdalena Saragi., & Syasi Ikhilmi Syafira, 2022. Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468.
- Langwo, Angelita Serlina., & Saifhul Anuar Syahdan 2022. Determinan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan kota banjarmasin dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting UMKC*, 1(1).
- Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2017 – 2021. Sumber: <https://jateng.bpk.go.id/laporan-hasil-pemeriksaan-lkpd>. (diakses 19 Oktober 2022).
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta* : Penerbit Andi.
- Nilawati., Naz'aina., & Muhammad Haykal 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (2021). *Jurnal Manajemen Indonesia*. 6(2), 60-74. <https://10.29103/j-mind.v6i2.5127>.
- Noordiawan,D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Putro, Dian Permana (2019). Pengaruh kualitas pengelolaan barang milik negara dan efektifitas implementasi aplikasi simak-bmn yang terintegrasi kedalam, sakti terhadap kualitas laporan keuangan, *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bakrie.

**Septiana Rahma Asri dan Jaeni**, *Peran SPI sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Teknologi Informasi dan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKAD Kota Semarang)*

Rahmawati, M., & Trisnawati R., 2021. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *RAAR: Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 3949.

Sujarweni, V. W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.

Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.